

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**Ningsi Goni¹, Josep Bintang Kalangi², Krest D. Tolosang³**^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado, 9511, Indonesia

Email : ningsigoni@gmail.com**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi hampir setiap negara, terdapat banyak variabel yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya merupakan pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia secara individu maupun bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Minahasa Tenggara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk time series pada tahun 2009-2021 yaitu presentasi penduduk miskin, jumlah pengeluaran pemerintah dan presentasi indeks pembangunan manusia. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara dengan metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara, sedangkan variabel indeks secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara dan secara simultan pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009-2021.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah; Indeks Pembangunan Manusia; Kemiskinan**ABSTRACT**

Poverty is a problem for almost every country, there are many variables that affect poverty including government spending and human development index. The purpose of this study was to determine the effect of government expenditure and human development index by individually and together on poverty level in Southeast Minahasa regency. The data used is secondary data in the form of time series in 2009-2021, that is the percentage of the poor, the quantity of government expenditure and the percentage of human development index. The data sourced from Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara with the analytical method in this study is multiple regression linier analysis using the OLS (Ordinary Least Squares) method. The results of this study indicate that the government spending variable has a negative and significant effect on poverty in Southeast Minahasa Regency, while the human development index variable partially has a negative and no significant on poverty level in Southeast Minahasa Regency and simultaneously government expenditure and the human development index have a significant effect on poverty in Southeast Minahasa Regency.

Keywords: Government Spending; Human Development Index; Poverty**1. PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dalam satu wilayah berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini berarti pemerintah daerah harus mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam setiap periode pembangunan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Nugroho, 1995). Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan juga dengan jumlah pendapatan yang sedikit, kesehatan yang buruk, tempat tinggal yang kurang layak dan pendidikan yang rendah. Dalam kutipan Nugroho (2015), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1993) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Pada umumnya kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan dan pendidikan.

Presiden mengeluarkan perpres No.54 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan sehingga Kabupaten Minahasa Tenggara membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Melakukan Koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak jauh berbeda dengan permasalahan pemerintah pusat (masalah nasional), oleh karena itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan kesejahteraan masyarakat untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah – langkah yang sistematis dan strategis untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Sulawesi Utara 2017 – 2019 (%)

| Kabupaten/kota | Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kota Manado | 5.51 | 5.86 | 6.19 |
| Kota Tomohon | 5.62 | 5.60 | 5.69 |
| Kota Kotamobagu | 5.71 | 5.42 | 5.74 |
| Bolaang Mongondow Timur | 6.10 | 5.88 | 6.10 |
| Kota Bitung | 6.49 | 6.41 | 6.43 |
| Minahasa Utara | 6.93 | 7.00 | 7.11 |
| Minahasa | 7.18 | 7.30 | 7.67 |
| Bolaang Mongondow | 7.47 | 7.27 | 7.58 |
| Sulawesi Utara | 7.66 | 7.62 | 7.77 |
| Bolaang Mongondow Utara | 8.45 | 8.41 | 8.03 |
| Minahasa Selatan | 9.26 | 9.14 | 9.37 |
| Kepulauan Sitaro | 9.56 | 8.94 | 8.94 |
| Kepulauan Talaud | 9.86 | 9.49 | 9.00 |
| Kepulauan Sangihe | 11.15 | 11.14 | 11.02 |
| Minahasa Tenggara | 12.78 | 12.30 | 12.47 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 13.27 | 12.77 | 12.85 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara masih menduduki kedua tertinggi presentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 yakni 12,78% berbeda jauh dengan kabupaten dengan presentase kemiskinan terendah yang diduduki oleh Kota Manado yakni 5,51% pada tahun 2019. Sehingga Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan kabupaten prioritas program operasi daerah selesaikan kemiskinan dan program tersebut telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, namun tidak terlalu signifikan walau data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata. Meskipun berbagai kebijakan pemerintah kabupaten telah dilakukan akan tetapi angka kemiskinan masih saja tinggi jika di bandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Wujud nyata dari adanya campur tangan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan adalah dengan adanya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Susunan pengeluaran pemerintah daerah disusun dengan mengaitkan penerimaan daerah dalam sebuah susunan sistematis yang dinamakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mustopadidjaya (1997) menyatakan bahwa Penyusunan rencana Anggaran Pengeluaran salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang

menyangkut pengalokasian pada program-program yang dihubungkan baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sasaran - sasaran spesifik sektoral dan regional tertentu.

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Rumus ini merupakan pandangan kaum Keynesian yang mempunyai makna seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional dalam hal ini dapat di katakan seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah. (Wibisono,2003).

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan disuatu wilayah daerah, dengan kata lain indeks pembangunan manusia merupakan gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari tahun sebelumnya, ini menunjukkan kemajuan program pembangunan yang ditunjukkan pada awal dan akhir periode pemerintahan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Baeti, 2013).

Peningkatan nilai IPM akan sangat bergantung pada komitmen penyelenggara pemerintahan untuk dapat meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Menurut *United Nations Development Programme* (1996), dalam kutipan (Anitasari & Soleh, 2015) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu :

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup pada saat kelahiran
2. Pengetahuan yang diukur dengan an gka harapan lama sekolah pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah atau gross enrollment ratio
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP perkapita produk

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan, pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan dan pengaruh pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dalam struktur Produk Nasional Bruto (PNB). Dalam sebuah pemerintahan, pemerintah akan melakukan pengeluaran atau pembelian agar operasional dan roda perekonomian tetap berjalan. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut pandangan Keynes pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Yang lebih dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel lainnya mencerminkan permintaan agregat. Dengan melihat nilai G terhadap Y dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman dan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2013).

Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah setiap tahunnya, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi.

Menurut Baswir (1999), secara umum anggaran pemerintah dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode dimasa yang akan datang. Berdasarkan struktur anggaran yang dipakai sekarang, maka anggaran pemerintah daerah dinamakan anggaran terpilih. Struktur anggaran pemerintah, dalam sistem anggaran di Kabupaten Minahasa Tenggara dikenal dua macam pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk operasionalisasi pemerintah seperti halnya untuk pembayaran gaji pegawai dan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk investasi pemerintah, diantaranya investasi disektor publik.

2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. Teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain; diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan dibawahnya (Backer, 1962).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2009).

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. kemiskinan ini merupakan gambaran dari kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai standar yang berlaku. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat (Nurwati 2008). Dalam hal ini Masalah kemiskinan merupakan masalah yang umum terjadi di negara manapun terutama di negara yang sedang berkembang.

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan Nurkse (1953). Lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi, sehingga

menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara khususnya negara berkembang mengalami banyak masalah untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. (Kuncoro, 2006).

Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan sumber daya manusia yang tercermin oleh tingkat pendidikan yang rendah, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah, sehingga pendapatan rendah mengakibatkan kemiskinan dan setersunya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953 yang menyatakan "*a poor country is poor because it is poor*").

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan Kaharudin, Kumenaung dan Niode (2019) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Kota Manado, dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Dari hasil penelitian tersebut variabel belanja pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tetapi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Manado, koefisien determinasi menunjukkan bahwa penelitian variabel ini sudah memiliki pengaruh, akan tetapi pengaruhnya secara simultan dapat dikategorikan masih rendah karena hasil perhitungan menunjukkan koefisien determinasi berada dibawah angka yang seharusnya. Dari hasil uji asumsi klasik, dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah pada uji autokorelasi tetapi pada kemiskinan terdapat masalah autokorelasi.

Penelitian yang dilakukan Pratama dan Utama (2019) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan teknik jalur dan berdasarkan penelitian, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

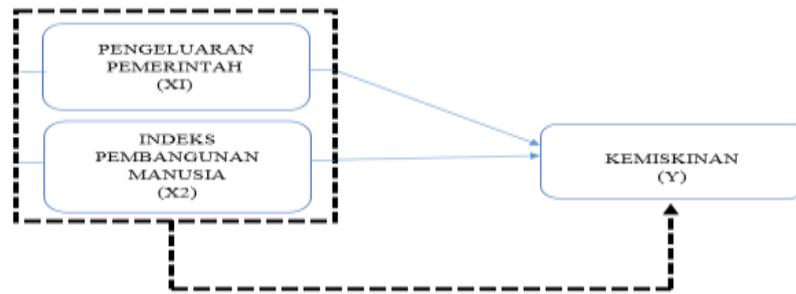
Penelitian oleh Rangkuti (2019) menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2017. Dengan menggunakan analisis regresi berganda dimana hasil yang di dapat menyatakan index pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan Pangabean dan Matondandang (2009) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 – 2017 menggunakan analisis regresi data panel. Berdasarkan penelitian, pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian yang dilakukan Miar dan Yunani (2020) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan menggunakan teknik analisis jalur dengan hasil variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Selain pengaruh langsung, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah secara tidak langsung mampu mempengaruhi perubahan penurunan kemiskinan di Indonesia melalui variabel pertumbuhan ekonomi.

Kerangka Pikir Konseptual

Gambar 1. Kerangka Pikir Konseptual



Sumber: Kajian Teori (Diolah Penulis)

Berdasarkan gambar diatas, maka praduga yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia sama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif dikarenakan mengacu pada perhitungan analisis data penelitian yang berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Data kuantitatif terdiri dari pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk dan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan data *time series* pada tahun 2009 – 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu presentase penduduk miskin, presentase indeks pembangunan manusia dan jumlah pengeluaran tiap tahunnya di Kabupaten Minahasa Tenggara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Tenggara, maupun sumber lain yang berhubungan untuk memperoleh data sekunder, dengan alat analisis yang digunakan adalah *E-Views*.

Metode Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda dengan model kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*). Data yang digunakan adalah runtut waktu (*time series*) dengan metode estimasi OLS. Fungsi persamaan dasarnya adalah :

$$Y = f(X1, X2)$$

Persamaan di atas kemudian h diturunkan menjadi persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 \ln X1_t + \beta_2 X2_t + \epsilon_t$$

Dimana :

- Y = Kemiskinan
- β_0 = *intercept*
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi
- ln = logaritma natural
- X1 = Pengeluaran Pemerintah
- X2 = Indeks Pembangunan Manusia
- ϵ = *Error Term*
- t = 1, 2, 3,13 (*time series 2009-2021*)

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk menghindari timbulnya penyimpangan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah uji normalitas dengan menggunakan uji *jarque bera*, Uji Multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)*, Uji Autokorelasi menggunakan uji *Breusch-Godfrey (BG)* atau yang biasa dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier*, dan Uji Heteroskedasititas menggunakan uji *white*.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia secara bersama – sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu kemiskinan. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka variabel independen sama – sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau uji parsial ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel secara individual terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan pada uji t yaitu apabila p-value < 0,05 atau 5% dapat diambil keputusan bahwa masing – masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dapat menerangkan dengan baik atau seberapa besar sumbangannya terhadap variasi variabel dependen yaitu pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan nilai R2 dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam regresi linear.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Hasil Regresi

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Sample: 2009 2021

Included observations: 13

| | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 100.4852 | 20.59773 | 4.878460 | 0.0006 |
| LN_X1 | -3.661606 | 1.084426 | -3.376538 | 0.0070 |
| X2 | -0.169730 | 0.178552 | -0.950593 | 0.3642 |

Sumber: Hasil Output Eviews

Berikut hasil estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) variabel pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari hasil pengolahan data time series dengan estimasi OLS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_t = 100,485 - 3,661\ln X1_t - 0,169X2_t + \epsilon_t$$

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh tersebut, diketahui bahwa :

1. Koefisien konstanta sebesar 100.485 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut positif yang berarti tanpa adanya kedua variabel independen yaitu variabel pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia, kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009 - 2021 tetap bernilai 100.485.

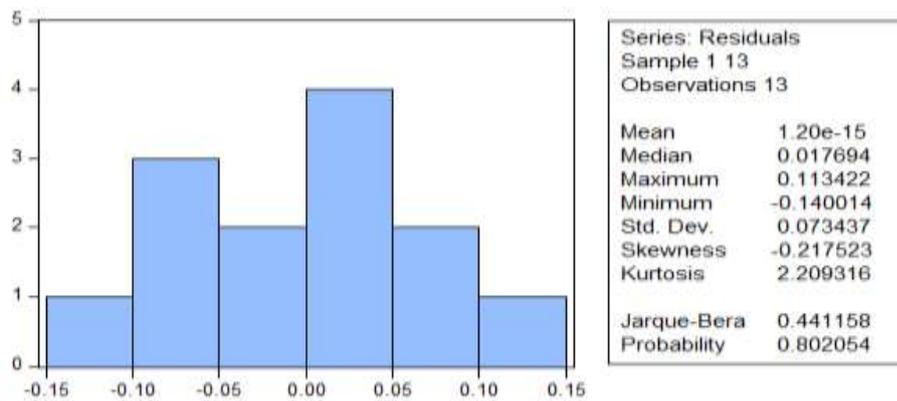
2. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah adalah -3.661 yang berarti jika pengeluaran pemerintah naik, kemiskinan akan turun, begitupun sebaliknya jika pengeluaran pemerintah turun, maka kemiskinan akan naik
3. Koefisien regresi indeks pembangunan manusia bernilai sebesar -0.169 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen dari variabel indeks pembangunan manusia, kemiskinan akan turun sebesar 0,16 persen

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera (JB Test) yaitu dengan ketentuan apabila probabilitas JB memiliki nilai lebih besar dari 0,05 (5%) maka data memiliki distribusi normal, sedangkan jika probabilitas JB nilainya di bawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Output Eviews

Dari Gambar di atas, menunjukkan hasil dari probabilitas bernilai 0,81 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas

Dalam pengujian multikolinearitas, jika nilai Variance Inflator Factor (VIF) < 10 , maka terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variable | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|----------|----------------------|----------------|--------------|
| C | 424.2665 | 3943.434 | NA |
| LN_X1 | 1.175980 | 4469.712 | 1.174181 |
| X2 | 0.031881 | 1403.013 | 1.174181 |

Sumber: Hasil Output Eviews

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai VIF antara variabel bebas sebesar 1,741, dimana nilai tersebut kurang dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Breusch Godfrey (BG), Jika nilai Prob.Chi Square > 0,05 maka tidak terjadi masalah autokorelasi, begitu pun sebaliknya.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 3.117104 | Prob. F(2,8) | 0.0998 |
| Obs*R-squared | 5.693657 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0580 |

Sumber: Hasil Output Eviews

Berdasarkan Tabel 4 nilai Prob. Chi Square sebesar 0,58, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

4. Uji Heteroskedasititas

Uji White merupakan salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah heterokedasititas, dilihat dari nilai probabilitas < 0,05 maka terjadi gejala heterokedasititas dalam model penelitian sedangkan jika nilai probabilitas > 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedasititas dalam mode penelitian.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedasititas

Heteroskedasticity Test: White

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.359413 | Prob. F(5,7) | 0.8612 |
| Obs*R-squared | 2.655640 | Prob. Chi-Square(5) | 0.7529 |
| Scaled explained SS | 1.066799 | Prob. Chi-Square(5) | 0.9570 |

Sumber: Hasil Output Eviews

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji white tersebut memperlihatkan nilai Prob.Chi-Square sebesar 0,75 > 0,05. Dengan demikian maka tidak terjadi masalah heteroskedasititas.

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 6 Hasil Uji F

| | |
|-------------------|----------|
| F-statistic | 8.675487 |
| Prob(F-statistic) | 0.006533 |

Sumber: Hasil Output Eviews

Berdasarkan Tabel 6, nilai Probabilitas variabel independen adalah 0,006 < 0,05 yang berarti pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan secara bersama – sama atau simultan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji hipotesis yang dilakukan secara individual (uji t) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan
 Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki t-statistik -3.376 dengan probabilitas sebesar 0,00. Nilai t-statistik yang negatif menunjukkan bahwa pengeluaran

pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel pengeluaran pemerintah secara individu signifikan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai t-statistik sebesar -0.950 dan probabilitas sebesar 0,364 dalam taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dapat menerangkan dengan baik atau seberapa besar sumbangannya terhadap variasi variabel dependen yaitu pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia.

Tabel 7 Hasil Uji Determinasi

| | |
|---------------------------|-----------------|
| R-squared | 0.634382 |
| Adjusted R-squared | 0.561259 |

Sumber: Hasil Output Eviews

Berdasarkan Tabel 7, hasil perhitungan koefisien determinasi adalah senilai 0,561 atau 56% sedangkan sisanya yaitu $100\% - 56\% = 44\%$ merupakan berasal dari variasi variabel lain yang di jelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan model estimasi yang di dapat, pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara sepanjang tahun 2009 – 2021. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengeluaran pemerintah bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap penurunan dari variabel pengeluaran pemerintah akan dapat menyebabkan peningkatan variabel kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun. Artinya, apabila pengeluaran pemerintah di Kabupaten Minahasa Tenggara semakin meningkat, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Utama (2019) yang berjudul pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara 2009 – 2021. Koefisien regresi untuk variabel indeks pembangunan manusia bernilai negatif, yang artinya semakin tinggi indeks pembangunan manusia, maka kemiskinan bisa semakin teratasi. Dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Hal ini berlawanan dengan teori, namun hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Rangkuti (2019) yang melakukan penelitian pengaruh indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki koefisien negatif, dengan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara, hal tersebut adalah wajar terjadi. Perubahan indeks pembangunan manusia tidak secara langsung dapat mengubah jumlah penduduk miskin dari perubahan pendidikan, kesehatan dan hidup layak. Ini sesuai dengan keadaan sekarang dimana banyaknya lulusan – lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur karena keterbatasan lapangan kerja atau mungkin pekerjaan yang ada belum sesuai dengan minat menjadikan pengangguran terdidik bertambah yang menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia sama – sama atau simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009 – 2021. Kemampuan variasi variabel pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia dalam menjelaskan variasi variabel kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebesar 56% sedangkan sisanya sebesar 44% dijelaskan oleh variasi dari variabel lain diluar penelitian ini.

Pengeluaran-pengeluaran itu tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga mengurangi tingkat kemiskinan. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009 – 2021.
2. Indeks Pembangunan Manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Pengeluaran pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen*, Vol.3 NO.2.
- Backer, G. S. (1962). Investment in Humal Capital : a theoretical analysis. *The Journal of Political Economy*, Vol. 70 No.5 Hlm: 9-49.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (1993). *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Data Seris Subjek*. Retrieved from Indeks Pembangunan Manusia: <https://www.bps.go.id/indicator/26/7/1/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Angka*. Amurang.
- Badan Pusat Statistik;. (2009). *Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Angka*. Amurang. Retrieved from Minahasa Tenggara Dalam Angka: <https://mitrakab.bps.go.id/>

- Baeti , N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.2 (3) (2013).
- Baswir, R. (1999). *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Kasus pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 19, No 04.
- Kuncoro, M. (2006). *Investment in Humal Capital : a theoretical analysis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miar, M., & Yunani, A. (2020). Analysis of Influence of The Government Expenditure on Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume. 18 No. 1.
- Mustopadidjaya, A. ((1997:12)). *Sistem dan Proses Penyusunan APBDN*. Ujung Pandang.
- Nugroho, A. P. (2015). Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi. *E-Journal UMY*.
- Nugroho, H. (1995). *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan, Model Pengukuran Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, Vol.10, No.10.
- Pangabean , M., & Matondang, E. R. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM),. *Jurnal FEB Untan*.
- Pratama, N. R., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Volume 08 No 07.
- Rangkuti, J. R. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Panca Budi*, Vol.1, No.1.
- Sukirno. (2013). *Pengantar Teori Makro Ekonomi* . Jakarta: Rajawali Pers.
- UNDP. (1996). *Human Development Report*. Retrieved from Apa itu Indeks Pembangunan Manusia.
- Wibisono. (2012). Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Implementasi Pada Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Datar.